

**PENGARUH KINERJA KELOMPOK DAN FAKTOR SOSIAL
DEMOGRAFI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT:
STUDI DI TIGA KELOMPOK HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
KPH III BUKIT PUNGGUR KABUPATEN WAY KANAN**

(Skripsi)

Oleh

PRILA IDAYANTI



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENGARUH KINERJA KELOMPOK DAN FAKTOR SOSIAL DEMOGRAFI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT: STUDI DI TIGA KELOMPOK HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) KPH III BUKIT PUNGGUR KABUPATEN WAY KANAN

Oleh

PRILA IDAYANTI

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan kegiatan perhutanan sosial yang diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutannya. Salah satu KPH di Provinsi Lampung yang memiliki kelompok HKm yaitu KPH III Bukit Punggur, Way Kanan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pendapatan masyarakat kelompok HKm di tiga HKm dan menentukan nilai peranan faktor sosial demografi terhadap pendapatan masyarakat petani di HKm Mangga Mulyo, HKm Panca Tunggal dan HKm Jaya Lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kelompok HKm berpengaruh nyata terhadap tingkat pendapatan petani di HKm Mangga Mulyo ($P=0,073$) dan HKm Panca Tunggal ($P=0,031$). Secara simultan, faktor sosial demografi berpengaruh sangat nyata terhadap pendapatan masyarakat petani di HKm Mangga Mulyo, HKm Panca Tunggal, dan HKm Jaya Lestari dengan nilai

$P = 0,000$. Peranan faktor tersebut berada pada kelompok aset ekonomi yaitu pada variabel jumlah jenis tanaman ($P=0,005$), luas lahan garapan petani baik di lahan HKm ($P=0,000$) maupun lahan marga ($P=0,020$), dan kepemilikan ternak sapi ($P=0,095$).

Kata Kunci: hutan kemasyarakatan, pendapatan, pengelolaan, sosial demografi

ABSTRACT

THE EFFECT OF GROUP PERFORMANCE AND DEMOGRAPHY SOCIAL FACTORS ON COMMUNITY INCOME: STUDY IN THREE COMMUNITY FOREST (CF) KPH III BUKIT PUNGGUR WAY KANAN REGENCY

By

PRILA IDAYANTI

Community Forestry (CF) is a social forestry activity held with which aim to improve the welfare of community around the forest while maintaining the sustainability of forest functions. One of the KPH in Lampung Province which has a CF group is KPH III Bukit Punggur, Way Kanan. This study aims to compare the level of income of the CF community in three CF and determined value of role social demographic factors in the income of farmers at Mangga Mulyo CF, Panca Tunggal CF and Jaya Lestari CF. The method used in the research is quantitative methods and uses multiple linear regression analysis. The results showed that the performance of the CF group had a significant effect on the level income of farmers in Mangga Mulyo CF ($P = 0.073$) and Panca Tunggal CF ($P = 0.031$). Simultaneously, social demographic factors have a very significant effect income of farmers in Mangga Mulyo CF, Panca Tunggal CF, and Jaya Lestari CF with a value of $P = 0,000$. The role of these factors is in the

group of economic assets, namely the variable number of plant species ($P=0.005$), cultivated land area of farmers both on CF land ($P = 0,000$) and clan land ($P=0.020$), and cattle ownership ($P = 0.095$).

Keywords: community forestry, income, management, social demography

**PENGARUH KINERJA KELOMPOK DAN FAKTOR SOSIAL
DEMOGRAFI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT:
STUDI DI TIGA KELOMPOK HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
KPH III BUKIT PUNGGUR KABUPATEN WAY KANAN**

Oleh

PRILA IDAYANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN**

Pada

**Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**: PENGARUH KINERJA KELOMPOK DAN
FAKTOR SOSIAL DEMOGRAFI TERHADAP
PENDAPATAN MASYARAKAT:
STUDI DI TIGA KELOMPOK HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKm) KPH III BUKIT
PUNGGUR KABUPATEN WAY KANAN**

Nama Mahasiswa

: Prila Idayanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 1514151076

Program Studi

: Kehutanan

Fakultas

: Pertanian

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
NIP 19610505 198703 1 002

Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.
NIP 19641226 199303 2 001

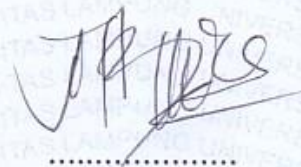
2. Ketua Jurusan Kehutanan

Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si.
NIP 19770503 200212 2 002

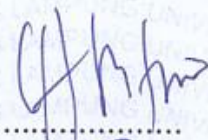
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

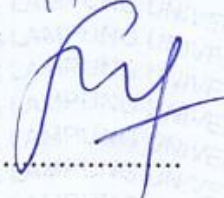
Ketua : **Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.**

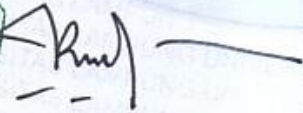


Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.**



2. Dekan Fakultas Pertanian




Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP 19611020 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juli 2019**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Pajaresuk Kabupaten Pringsewu pada tanggal 19 April 1996, sebagai anak dari Bapak Wagino, S.Pd. dan Ibu Tri Winarti, dan merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah

Dasar (SD) di SDN 3 Pajaresuk pada tahun 2002 - 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu pada tahun 2008 - 2011, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Pagelaran pada tahun 2011 - 2014.

Tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unila melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pernah mendapatkan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) selama 2 tahun. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Kehutanan (Himasyiva) Fakultas Pertanian Universitas Lampung sebagai Anggota Utama. Penulis juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung sebagai Staff Ahli Kementerian Sosial dan Politik tahun 2016-2017, dan pernah menjadi asisten dosen mata kuliah Pembangunan Kehutanan tahun 2019.

Penulis telah melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2018 di Desa Karang Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Tahun 2018, penulis melakukan Praktik Umum (PU) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan Divisi Regional I Jawa Tengah.

Bismillahirrahmanirrahim

***Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku:
Ayahanda Wagino S.Pd dan Ibunda Tri Winarti Tercinta
Serta Kedua Kakak dan Adik-adikku Tersayang***

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamiin, puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi dengan judul “**Pengaruh Kinerja Kelompok dan Faktor Sosial Demografi terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi di Tiga Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) KPH III Bukit Punggur, Kabupaten Way Kanan**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., selaku pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta membantu mendanai penelitian ini;

4. Ibu Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., selaku pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta membantu mendanai penelitian ini;
5. Bapak Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S., selaku penguji utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Awal Budiantoro, S.Hut., M.Eng selaku kepala UPTD KPH III Bukit Punggur, Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan izin pengambilan data penelitian di lokasi KPH III Bukit Punggur.
7. Bang Fredy Rahman Dani, S.Hut. selaku bakti rimbawan KPH III Bukit Punggur yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan menyediakan tempat selama penelitian berlangsung;
8. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si., selaku pembimbing akademik penulis;
9. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku ketua tim percepatan skripsi dan seluruh tim yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi dapat berjalan lancar dan lulus tepat waktu;
10. Bapak dan Ibu Dosen Kehutanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unila;
11. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan Jurusan Kehutanan dan Fakultas Pertanian Unila yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi;
12. Bapak Wagino, S.Pd. dan Ibu Tri Winarti, selaku orang tua kandung Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini;

13. Kakak-kakak dan Adik-adik kandung, serta keluarga besar Penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Bang Yustinus Seno, S.Hut., Bang Imawan Abdul Qohar, S.Hut., Bang Yanfa Ghiyats Ghifari, dan Mba Ghina Zhafira, selaku tim yang telah bekerjasama dan membantu dalam penelitian ini;
15. Kehutanan 2015 (TW15TER) selaku rekan angkatan seperjuangan yang selalu *support*;
16. Seluruh teman dan sahabat Penulis khususnya Endah Susilowati, S.Hut., Deya Puspa A., Dewi Ira Rahmawati, S.Hut., Dewi Purnamasari, Agung Tri Cahyo, Suci Rahmadhani, S.Hut. dan Dedy Riyanto, S.Hut. atas segala bantuan, dukungan dan kebersamaan yang telah kalian berikan;
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan segala kerendahan hati semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan.

Aamiin.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Prila Idayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian	4
1.3 Kerangka Pemikiran.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan	7
2.2 Sejarah Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Way Kanan.....	9
2.3 Hutan dan Perhutanan Sosial	11
2.4 Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	14
2.5 Hubungan Pendapatan dengan Kesejahteraan	17
2.6 Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>)	19
2.7 Agroforestri.....	21
2.8 Sosial Demografi	23
2.9 Kinerja Kelompok.....	27
2.10 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	30
III. METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.2 Alat dan Objek Penelitian	34
3.3 Batasan Penelitian.....	34
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.4.1 Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder	35
3.4.2 Wawancara	35
3.4.3 Sampel Penelitian	36
3.5 Analisis Data.....	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Responden.....	39
4.2 Uji F dan Uji T regresi linier pendapatan dengan variabel independen	44

	Halaman
V. SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	76
Tabel 6.....	76
Hasil output minitab.....	80
Gambar 7 – 14.....	83-87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Variabel penduga (<i>predictor</i>), simbolisasi dan pemberian skor dalam model	37
2. Identitas responden dengan analisis deskriptif	39
3. Status responden di tiga HKm	44
4. Hasil optimasi parameter variabel X dengan pendapatan	44
5. Hasil optimasi parameter pemodelan regresi Uji T menggunakan <i>minitab 16</i>	46
6. Data rekapan hasil kuisioner yang telah dilakukan (<i>Dummy</i>)	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram alir kerangka pemikiran	6
2. Peta lokasi penelitian	33
3. Grafik pengelompokan umur responden.....	41
4. Luas garapan lahan HKm (ha)	41
5. Luas garapan lahan marga (ha)	42
6. Jumlah tanggungan responden	43
7. Tugu kawasan hutan lindung Register 24 KPHP Bukit Punggur	83
8. Sadapan karet di dalam hutan sebagai pendapatan utama masyarakat .	83
9. Hasil panen getah karet di salah satu rumah warga	84
10. Kegiatan diskusi dan wawancara kepada petani di HKm Panca Tunggal.....	84
11. Diskusi dengan salah satu penyuluh kehutanan setempat.....	85
12. Kegiatan diskusi dan wawancara kepada petani di HKm Panca Tunggal.....	85
13. Kegiatan diskusi dan wawancara kepada petani di HKm Jaya Lestari di lapangan	86
14. Kegiatan diskusi dan wawancara kepada petani di HKm Mangga Mulyo	86
15. Kondisi sekitar lahan petani	87
16. Foto bersama tim setelah melakukan wawancara	87

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Hutan merupakan sumberdaya alam esensial yang mampu menyediakan bahan-bahan kebutuhan dasar manusia seperti papan, pangan, obat-obatan bahkan sumber pendapatan bagi masyarakat disekitar hutan (Sanjaya, 2016). Sejak tahun 2009 hutan mengalami ketidakseimbangan akibat perambahan (*Forest Watch Indonesia*, 2015). Perambahan hutan terjadi karena ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, yang berakibat pada rusaknya sumberdaya dan kemerosotan biodiversitas (Nurhaida dkk., 2011; Bakri dan Setiawan, 2017). Dengan demikian, implementasi program Perhutanan Sosial haruslah segera diwujudkan secara berkelanjutan (Marwa dkk., 2010; Nurrochmat dkk., 2014). Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No P.83 tahun 2016, salah satu kegiatan Perhutanan Sosial adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang saat ini kepengurusannya diserahkan di tingkat provinsi (Wulandari dkk., 2016).

Sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara optimal, adil dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tetap menjaga kelestarian fungsi hutannya merupakan tujuan dari terbentuknya HKm. Berkaitan dengan hal

tersebut, pengolahan lahan dengan menerapkan sistem agroforestri sangat dianjurkan untuk dapat meningkatkan pendapatan maupun biodiversitas lahan (Kaskoyo dkk., 2017). Selain itu, kelompok tani dalam mendukung tujuan peningkatan pendapatan petani dan biodiversitas perlu dikembangkan kemampuannya, seperti melalui pelatihan dan penyuluhan. Kinerja kelompok tani merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh kelompok tani untuk mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan dalam usahatannya (Firdausi dkk., 2014). Menurut Wulandari dkk. (2014), keterlibatan masyarakat di sekitar hutan dapat mengoptimalkan lahan hutan dengan menerapkan agroforestri berbasis kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sistem agroforestri yang dilakukan di areal kerja HKm diharapkan mampu memulihkan fungsi hutan sekaligus berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Puspasari dkk., 2017).

Selain pola pengelolaan lahan, pendapatan dapat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor yang ada pada diri individu petani. Menurut Nazir (2010), pendapatan seseorang sangat berpengaruh dari alokasi waktu yang digunakan dalam berusaha. Semakin banyak seseorang menggunakan waktu dalam berusaha maka semakin besar pendapatan yang akan diperolehnya. Selain alokasi waktu, perubahan pendapatan dipengaruhi oleh kepemilikan, harga dan pilihan pekerjaan yang kemudian ditambah dengan pengaruh sosial demografi.

Studi sosial demografi menyatakan faktor sosial dimaknai sebagai hubungan yang terjadi antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, dan lingkungan yang lebih luas lagi (Silalahi, 2015). Faktor demografi dimaknai sebagai keadaan

tentang kependudukan suatu masyarakat, karena faktor tersebut berhubungan dengan kehidupan sosial dimasyarakat dan uraian tentang kependudukan petani (Winata dan Yuliana, 2012; Pulungan dkk., 2015). Faktor sosial demografi berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Masri, 2010; Nurdin dan Adioetomo, 2010).

Identifikasi peranan faktor sosial demografi sangat berguna bagi pemerintah setempat untuk mengambil kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem hutan, terutama masyarakat yang tergabung dalam kelompok HKm Mangga Mulyo, HKm Panca Tunggal, dan HKm Jaya Lestari. Kelompok HKm di wilayah KPH III Bukit Punggur memiliki tanaman karet sebagai penghasil utama keluarganya. Getah karet (lateks) merupakan hasil hutan bukan kayu yang memiliki nama ilmiah *Hevea brasiliensis*.

Selain itu, kinerja kelompok HKm secara keseluruhan perlu diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan petani. Menurut Sumarlan dkk. (2012) perlu adanya semangat kelompok dalam menjalankan tugasnya dan adanya faktor penyuluh yang secara intensif melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja petani dalam penerapan sistem agroforestri, agar kesejahteraan petani dapat meningkat melalui peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk

- a. Membandingkan tingkat pendapatan masyarakat di tiga kelompok HKm.
- b. Menentukan nilai peranan faktor sosial demografi terhadap pendapatan masyarakat petani di HKm Mangga Mulyo, HKm Panca Tunggal dan HKm Jaya Lestari.

1.3 Kerangka Pemikiran

Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang tidak memiliki lahan, untuk ditanami guna diambil hasilnya. Pemerintah membuat program Hutan Kemasyarakatan untuk mengurangi laju kerusakan hutan yang setiap tahun semakin bertambah, yang terjadi akibat perambahan dan *illegal logging* (Surastyawan, 2017). Skema HKm dapat menjadi suatu inovasi untuk sektor kehutanan dan memberikan izin bagi para perambah untuk mengolah lahan di dalam kawasan hutan dengan perizinan dan syarat-syarat tertentu (Wulandari, 2009). Melalui skema ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

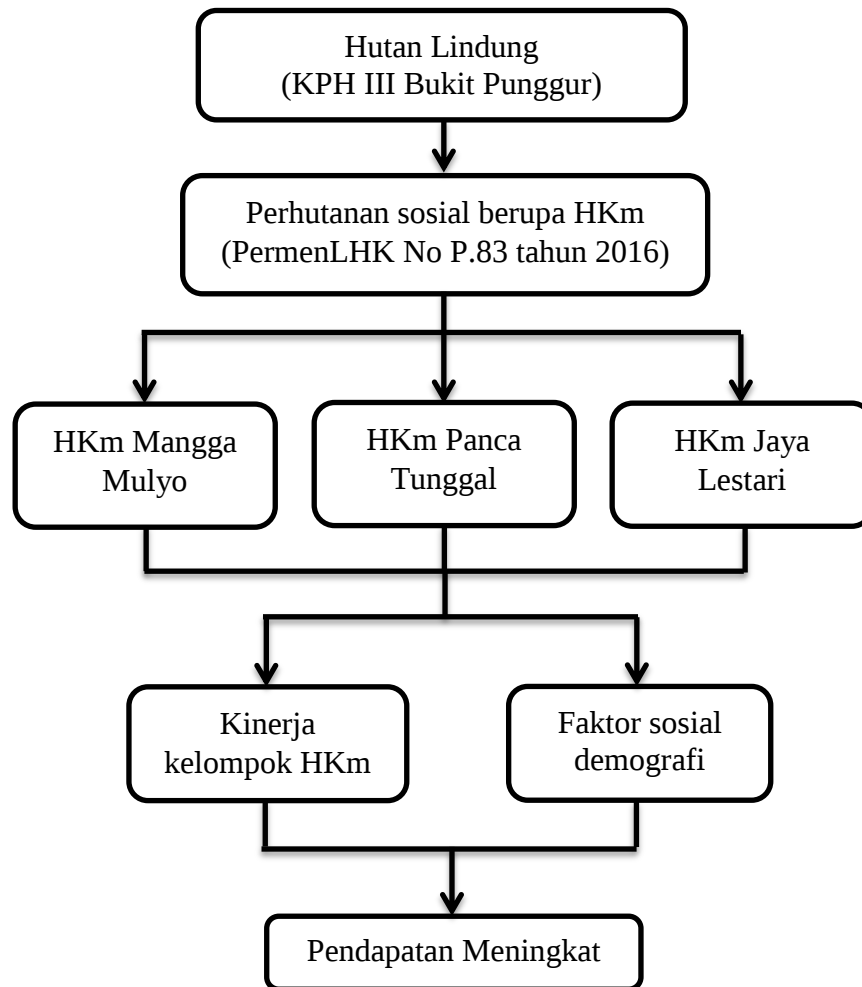
Seseorang dapat meningkatkan pendapatan melalui keikutsertaannya dalam kelompok HKm dan dapat dinilai melalui peranan faktor sosial demografi yang meliputi tingkat pendidikan, umur, status sosial, jumlah tanggungan, pendapatan dan luas lahan garapan (Masri, 2010; Nurdin dan Adioetomo, 2010; Watung dkk., 2013). Pulungan dkk. (2015) menambahkan variabel jarak tempat tinggal, jarak

lahan, kepemilikan alat komunikasi dan kendaraan, kepedulian serta kepercayaan terhadap tetangga dalam menilai tingkat kesejahteraan petani.

Menurut Yudischa dkk. (2014) serta Adalina dkk. (2015), faktor sosial demografi memberikan pengaruh yang nyata terhadap pendapatan keluarga petani.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudischa menunjukkan adanya pengaruh yang nyata terhadap pendapatan keluarga dalam pengelolaan HKm di Desa Tribudi Syukur dan Tribudi Makmur melalui faktor luas garapan, sedangkan faktor-faktor lain tidak memberikan pengaruh yang nyata. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pertiwi (2015) menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dari variabel jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan. Variabel-variabel tersebut diperoleh melalui wawancara langsung kepada petani di lokasi penelitian yang mengikuti HKm.

Lebih lanjut, kinerja kelompok petani dalam HKm dapat membantu peningkatan pendapatan dengan perluasan wawasan dan peran aktif dari kelompok HKm itu sendiri. Melalui program HKm dapat diteliti kinerja kelompok HKm dan faktor sosial demografi yang dapat memberikan peluang peningkatan pendapatan individu petani, sekaligus dapat menjaga kelestarian hutan dengan pengolahan yang benar melalui kinerja kelompok HKm agar ekosistem dapat tetap lestari. Jika hubungan antara kinerja kelompok HKm dan faktor sosial demografi terhadap pendapatan telah dapat dirumuskan secara benar, maka dapat dijadikan landasan oleh pemerintah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat peserta HKm melalui penelitian ini. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara.

Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro pada tanggal 20 April 1999. Peresmian berdirinya Kabupaten Way Kanan pada tanggal 27 April 1999 ditandai dengan pelantikan Pejabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Ibukota Kabupaten Way Kanan adalah Blambangan Umpu yang menjadi salah satu kampung tua di Kabupaten tersebut (Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, 2018).

Luas wilayah Kabupaten Way Kanan meliputi 3.921, 63 km², yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 221 kampung. Secara geografis, Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi antara 4°12' - 4°58' LS dan 104°17' – 105°04' BT, dengan batas wilayah meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, 2018).

Bentang alam Kabupaten Way Kanan dapat dikelompokkan ke dalam bentuk wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0-15% yang mencakup luasan $\pm 73,9\%$, bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan 15-25% memiliki sebaran $\pm 20,2\%$ dan berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25- >40% memiliki sebaran $\pm 5,9\%$. Way Kanan memiliki daerah lereng-lereng curam dengan ketinggian bervariasi antara 450-1700 mdpl. Daerah ini meliputi Kecamatan Kasui dengan puncaknya ada pada Bukit Punggur (1700 m), daerah Kecamatan Banjit dengan puncaknya ada pada Gunung Remas (1600 m) dan Gunung Bukit Duduk dengan ketinggian 1500 m (Surastyawan, 2017).

Topografi wilayah Kabupaten Way Kanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah topografi berbukit sampai bergunung dan daerah river basin. Daerah topografi berbukit sampai bergunung merupakan daerah dengan lereng-lereng yang curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450-1700 mdpl yang meliputi bukit barisan yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer, sekunder dan hutan yang terdiri dari bukit barisan dan bukit persegi. Daerah river basin merupakan daerah yang meliputi river basin sungai-sungai kecil yang berada didataran rendah (Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, 2018).

2.2 Sejarah Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Way Kanan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Way Kanan pada awalnya merupakan sebuah tindak lanjut dari diberlakukannya Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995. Tindak lanjutnya, Dirjen Pemanfaatan Hutan didukung oleh para LSM, universitas, dan lembaga internasional, merancang proyek-proyek uji-coba di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Hingga tahun 1997, bentuk pengakuan HKm masih sangat kecil. Lalu Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan No. 677/Kpts-II/1998, mengubah Keputusan No.622/Kpts-II/1995. Masyarakat diberikan hak pemanfaatan hutan non kayu atau disebut Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Menteri Kehutanan juga merancang pelayanan kredit agar masyarakat yang berminat dapat memulai unit-unit usaha berbasis hasil hutan. Promosi bentuk HKm ini merupakan suatu pendekatan yang dapat meminimalisir degradasi hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, kemudian Kepmenhut tersebut di ubah dengan Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001. Selanjutnya, HKm diatur secara bersama kegiatan hutan adat dan kemitraan dalam KemenLHK No. P.83/2016 dalam program perhutanan sosial. Adanya keputusan ini, masyarakat diberi keleluasaan lebih besar sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan.

Sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat yang memiliki lahan di wilayah hutan register yang bercocok tanam dengan pola berpindah-pindah, dengan harapan akan meminimalisir penggunaan lahan secara tidak terkontrol dan mengurangi laju kerusakan hutan secara masif. Sampai tahun 2019 ini, terdapat 10 kelompok HKm di KPH III Bukit Punggur, yaitu HKm Jaya Lestari, HKm

Sumber Rejeki, HKm Jaya Makmur, HKm Karya Makmur, HKm Mekar Jaya, HKm Putri Malu, HKm Harapan Jaya, HKm Harapan Makmur, HKm Panca Tunggal, dan HKm Mangga Mulyo.

Pengelolaan kawasan hutan lindung Register 24 Bukit Punggur yang berada di Kecamatan Rebangtangkas, Banjit dan Kasui Kabupaten Way Kanan secara resmi telah diserahkan pengelolaanya kepada kelompok tani melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).

a. HKm Mangga Mulyo

Izin pengelolaan hutan diberikan kepada HKm Mangga Mulyo melalui SK Menhut No.883/Menhut-II/2013 pada tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Areal Kerja HKm di Kampung Talang Mangga, Kampung Datar Bancong, Kampung Sinar Gading, Kecamatan Kasui.

b. HKm Panca Tunggal

Izin pengelolaan hutan di HKm Panca Tunggal juga diberikan melalui SK Menhut No.883/Menhut-II/2013 pada tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Areal Kerja HKm di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui.

c. HKm Jaya Lestari

Melalui Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, memberi izin pengelolaan hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut.II/2007 pada tanggal 7 September 2007 tentang HKm dan SK Menhut No.447/Menhut-II/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Penetapan Areal Kerja HKm seluas 1.295 hektar yang diserahkan kepada HKm Jaya Lestari di Kampung Menanga Jaya, Kecamatan Banjit.

2.3 Hutan dan Perhutanan Sosial

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hutan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat (Sanjaya, 2016).

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hutan menurut fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 terbagi menjadi tiga yaitu hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung. Hutan konservasi berfungsi sebagai pengawetan satwa dan keanekaragaman tumbuhan serta ekosistemnya. Hutan produksi berfungsi untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan memanfaatkan produksi hasil hutan di kawasan hutan. Hutan lindung berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Bagi petani, hutan sangatlah penting artinya, karena merupakan kawasan pengatur tata air dan kesuburan tanah, penyangga kehidupan yang paling esensial, sumber kehidupan, sumber plasma nutfah, dan tempat berlindung dari ancaman kehidupan (Syofiandi dkk., 2016). Untuk jangka panjang, hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (*life supporting system*) dan sebagai kontributor

penyedia pangan (*forest for food production*). Oleh sebab itu, pembangunan kehutanan selalu memperhatikan dan bertujuan mewujudkan pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) karena fungsinya yang sangat penting dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Kemenhut, 2012).

Hasil hutan dapat membuka peluang berusaha dan komoditinya dapat bernilai tambah dengan mengubahnya menjadi berbagai olahan. Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung pada sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu dimasukkan kedalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan (Yusuf dan Makarawo, 2011).

Salah satu modal sukses yang muncul dari program pemerintah di bidang kehutanan yaitu program kehutanan masyarakat yang bertujuan untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Menurut Firmansyah dkk. (2015) pembangunan kehutanan penting untuk diperhatikan mengingat saat ini sekitar 48,8 juta orang bergantung hidupnya dari hutan dan 10,2 juta orang secara struktural ekonomi termasuk dalam kategori miskin. Sektor kehutanan juga merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan kehutanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Puspitasari dkk., 2013).

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting, mengingat intensitas interaksi masyarakat sekitar hutan dengan hutan sangat tinggi di semua wilayah Indonesia (Aji dkk., 2014; Ekawati dkk., 2015). Selain itu, petani sekitar

hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah (Suyanto dan Khususiyah, 2006). Perhutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan dengan dua elemen utama, yaitu partisipasi lokal dan peningkatan produktivitas secara lestari. Keterbatasan lahan garapan dan rendahnya pendapatan menjadi alasan bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan untuk menggarp lahan hutan (Djamhuri, 2008).

Pengelolaan hutan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat merupakan pengembangan dari program perhutanan sosial yang diharapkan dapat mengembalikan paradigma dari pendekatan yang bersifat partisipatif (Hakim, 2010). Menurut PermenLHK No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan bahwa perhutanan sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Bentuk program perhutanan sosial antara lain Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Program perhutanan sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian serta untuk pemeratan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Strategi optimum pengembangan program perhutanan sosial untuk masyarakat adalah

pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efisiensi dan keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya (Hakim, 2009).

2.4 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, maka dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Sanudin dkk., 2016).

Menurut PermenLHK No. P.83 tahun 2016 menjelaskan bahwa, Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan negara di area kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan manfaat sumberdaya hutan (Ramdani, 2016). Selain itu juga, diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas, masyarakat bisa memiliki kemampuan dan kepedulian untuk melakukan perlindungan terhadap fungsi ekologis hutan. Program ini diharapkan mampu mengakomodasi partisipasi dan kearifan masyarakat lokal sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal

untuk menjaga fungsi rehabilitasi, konservasi, dan kelestarian lingkungan (Elvida, dan Prahasto, 2008).

Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial (Arifin dkk., 2009; Dwiprabowo dkk., 2013; Mulyadin dkk., 2016). Selain itu, dalam PermenLHK Nomor P.83 tahun 2016 menyebutkan adanya tujuan peraturan menteri ini yaitu untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Peningkatan tersebut diarahkan melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Kawasan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi (Santoso, 2011).

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat telah terbukti menyelamatkan fungsi hutan di beberapa wilayah di Indonesia atau negara lain (Marwoto, 2012). Menurut Keraf (2010), pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga mampu mencegah kepunahan hutan. Kondisi ini bisa terjadi karena keharmonisan dan penyelarasan lingkungan yang mengutamakan keseimbangan ekosistem daripada kepentingan ekonomi. Hutan Kemasyarakatan (HKm) tidak dibebani hak kepemilikan namun diberikan ijin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat yang kewenangannya

diserahkan langsung di tingkat provinsi. Menurut Ramdani (2016), pelimpahan kewenangan dilakukan mengingat beberapa alasan. Pertama, berkurangnya kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kehutanan. Kedua, ada kecenderungan kondisi hutan yang dikelola oleh masyarakat jauh lebih lestari dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh Perhutani, atau pihak swasta pemegang hak pengelolaan hutan (HPH), seperti hutan yang dikelola masyarakat adat. Hal itu terjadi karena kebanyakan masyarakat desa mempunyai tradisi turun temurun dalam pengelolaan hutan yang dalam prakteknya pengelolaan hutan dilakukan bersama-sama seluruh anggota masyarakat.

Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan dengan jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun sekali. Program HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di sekitar hutan serta menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada (Purnomo, 2011). Terdapat empat perizinan yang dibutuhkan dalam melaksanakan skema HKm, yaitu permohonan IUPHKm, penetapan area kerja HKm, pemberian izin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm), pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HKm (IUPHHK-HKm). Permohonan IUPHKm diajukan untuk lokasi di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau kepada Gubernur untuk yang berlokasi lintas kabupaten/kota kepada Bupati atau Walikota diajukan oleh kelompok masyarakat dalam bentuk surat permohonan.

Areal kerja hutan kemasyarakatan merupakan kawasan hutan yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat

setempat dalam satu kesatuan yang dikelola secara lestari. Kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan, dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Areal kerja hutan kemasyarakatan ditetapkan oleh menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan (Surastyawan, 2012).

2.5 Hubungan Pendapatan dengan Kesejahteraan

Pendapatan merupakan hasil yang diterima oleh tenaga kerja baik berupa uang maupun barang sebagai imbalan atas faktor produksi yang telah diberikan. Pendapatan menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat (Lumintang, 2013). Pendapatan yang diterima oleh seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalamannya maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya.

Tingkat pendapatan juga sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, pengalaman, jenis barang dagangan (produk) dan banyak faktor lainnya (Nazir, 2010). Pangandaheng (2012), menyatakan bahwa pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan yang dilakukannya, baik pada

bidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan perjam yang diterima.

Melalui pendapatan, dapat diketahui tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Hal ini dikarenakan tercapainya pembangunan di suatu negara dapat terlihat dari seberapa besar kesejahteraan yang tercipta di lingkungan keluarga (Dewi, 2012). Adanya kerjasama dari seluruh anggota keluarga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dengan memperoleh pendapatan (Aswiyati, 2016). Pengoptimalan kesejahteraan pada keluarga miskin dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada (Haryono, 2008). Menurut Purwanti (2007), semakin banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan maka kegiatan pengelolaan lahan juga akan semakin baik.

Perekonomian di Indonesia terbagi menjadi tiga sektor, yakni sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer merupakan lingkungan suatu usaha yang menyediakan bahan baku. Sektor sekunder merupakan kelola bahan baku, dan sektor tersier merupakan suatu usaha pendistribusian barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor sekunder (Indrawati dan Yovita, 2014). Sektor primer mampu menyerap tenaga kerja paling banyak (44,04%), namun struktur ekonomi nasional menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani belum diimbangi dengan produktivitas pertaniannya (Moktan dkk., 2015).

Menurut Syofiandi dkk. (2016), pembangunan kehutanan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan dan bertujuan mewujudkan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management/SFM). Umumnya, tanaman kehutanan

tidak memberikan kontribusi karena petani menanam tanaman kehutanan di kebun untuk naungan atau tanaman pagar, sehingga untuk menunjang perekonomian keluarga, para petani menerapkan pola agroforestri pada lahannya (Olivi dkk., 2015). Penerapan sistem agroforestri diperoleh kesinambungan pendapatan, dimana tanaman semusim dan perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan dari kayu selain bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya temporal seperti kebutuhan anak sekolah, hajatan, membangun rumah, dan kebutuhan mendesak lainnya (Sanudin dan Priambodo, 2013).

Kesejahteraan keluarga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal berupa pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset dan tabungan. Faktor eksternal berupa kemudahan akses pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah dan kemudahan yang dimiliki oleh keluarga. Unsur manajemen keluarga dapat berupa perencanaan dan pembagian tugas (Liana, 2016).

2.6 Karet (*Hevea brasiliensis*)

Karet merupakan salah satu komoditi yang penting, bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial. Selain menjadi sumber utama penghasil karet alam (*lateks*) dan sumber devisa negara (Ulfah dkk., 2015), karet juga sebagai sumber penghasilan bagi keluarga petani. Karet yang memiliki nama

ilmiah *Hevea brasiliensis* tumbuh baik di Indonesia dengan iklim dan lingkungan yang memadai (Rani dan Santi, 2011).

Indonesia negara kedua terbesar, penghasil lateks di dunia (Budiman, 2012).

Lateks (getah karet) merupakan hasil fotosintesis yang disimpan pada jaringan-jaringan tertentu. Lateks tersebut terdapat di jaringan tanaman yang terletak diantara kulit kayu (xilem) dan kayu (floem). Penyadapan lateks ini dilakukan pada pohon karet yang sudah berumur 5 tahun. Semakin dewasa pohon karet maka semakin banyak sarung pembuluh yang berisi lateks, sehingga produksi lateks juga lebih banyak (Ulfah dkk., 2015). Bahri (2006) juga mengatakan bahwa semakin bertambahnya umur tanaman akan meningkatkan produksi lateksnya, namun setelah mengalami masa stabil kemudian mengalami penurunan produksi.

Tanaman karet tumbuh dengan baik pada daerah tropis. Pada zone antara 150 LS dan 150 LU merupakan daerah yang cocok untuk tanaman karet. Pertumbuhan tanaman karet akan menjadi agak lambat bila ditanam di luar zona tersebut, sehingga memulai produksinya pun lebih lambat. Pada dataran rendah, yakni ketinggian sampai 200 meter di atas permukaan laut, tanaman karet akan tumbuh lebih optimal. Pertumbuhannya akan semakin lambat dan hasilnya lebih rendah seiring dengan semakin tingginya letak tempat. Ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut tidak cocok lagi untuk tanaman karet (Budiman, 2012).

Secara umum, di daerah tropis dicirikan oleh keadaan iklim yang hampir seragam. Perbedaan keadaan suhu, kelembaban dan curah hujan ditimbulkan atas adanya perbedaan geografis berupa perbedaan ketinggian tempat di atas permukaan laut

(dpl). Unsur-unsur cuaca dan iklim tersebut banyak dikendalikan oleh letak lintang, ketinggian, jarak dari laut, topografi, jenis tanah dan vegetasi (Andrian dkk., 2014).

2.7 Agroforestri

Wanatani berasal dari kata 'wana' yang berarti pertanian (pengolahan lahan) dan merupakan terjemahan dari agroforestri Menurut *International Council for Research in Agroforestry*, mendefinisikan agroforestri sebagai berikut: "suatu sistem pengelolaan lahan dengan berasaskan kelestarian, menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat, mengkombinasikan produksi tanaman (termasuk tanaman pepohonan) dan tanaman hutan dan/atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, serta yang meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan," (Sukmawati dkk., 2014).

Agroforestri merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan secara multi tajuk yang terdiri dari campuran pepohonan (tanaman kehutanan) dengan tanaman semusim dalam satu bidang lahan (Olivi dkk., 2015). Menurut Hilmanto (2010), komoditas yang terbaik bagi lingkungan, makhluk hidup, produksi, dan pendapatan masyarakat berasal dari teknik pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat lokal yaitu teknik pengelolaan lahan yang berharmoni dengan alam. Bentuk bentang penggunaan lahan dan perkembangannya merupakan bagian dari identitas masyarakat yang hidup didalamnya. Petani biasanya memiliki kebutuhan yang kuat untuk memihak pada agama dan budaya setempat. Salah

satu fungsi agroforestri pada level bentang lahan yang sudah terbukti diberbagai tempat adalah kemampuannya untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, khususnya terhadap kesesuaian lahan (Olivi dkk., 2015).

Pengelolaan areal kerja HKm menerapkan sistem yang memadukan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. Menurut Mbow dkk. (2014) dalam pengelolaan hasil yang kompleks ini, praktik pertanian dan pengelolaan lahan merupakan kunci bagi agroforestri berkelanjutan. Coe dkk. (2014) mengemukakan tentang pilihan-pilihan dalam pengelolaan agroforestri yang harus sesuai dengan konteks ekologi dan sosial yang beragam di berbagai tempat.

Sistem agroforestri diharapkan dapat mengoptimalkan produktivitas lahan sehingga masyarakat dapat memanen hasilnya secara berkelanjutan; tergantung seberapa banyak variasi jenis yang dikombinasikan dalam satu lahan dan sistem pengelolaannya. Pemilihan komposisi jenis tanaman dan cara pengelolaannya menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sistem agroforestri ini. Sistem agroforestri yang telah dilakukan di areal kerja HKm diharapkan mampu memulihkan fungsi hutan sekaligus berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Puspasari dkk., 2017).

Agroforestri karet memiliki keunggulan tersendiri, selain keanekaragaman hasil dan kemampuan untuk mengkonservasi flora dan beberapa fauna.

Keanekaragaman hasil dari agroforestri karet dapat menjadi masukan untuk daerah (Sukmawati dkk., 2014). Kegiatan agroforestri karet dengan ditanamnya jenis tanaman hutan bertujuan untuk pelestarian hutan yang menitik beratkan pada

kepentingan ekologis. Pengusahaan tanaman karet yang merupakan jenis pepohonan yang bercabang, lebih difokuskan untuk menghasilkan pendapatan yang rutin. Masyarakat yang mengembangkan agroforestri telah menerapkan biodiversitas dalam sistem penggunaan lahan, dan juga menghasilkan produk-produk unggulan yang bernilai ekspor (Wijayanto dan Hartoyo, 2015).

2.8 Sosial Demografi

Karakteristik demografi terdiri dari jumlah tanggungan keluarga, pendidikan dan umur (Afandi, 2010; Budiartiningsih dkk., 2010; Andini dkk., 2013; Manyamsari dan Mujiburrahmad, 2014), untuk sosial ekonomi terdiri dari pendapatan dan luas lahan garapan (Suratiah, 2001). Informasi mengenai karakteristik petani dapat memberikan keterangan kondisi petani dan potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan. Penjelasan mengenai pendapatan dan kontribusi HKm dapat memberikan informasi mengenai berbagai permasalahan yang dialami petani (Dewi dkk., 2018).

Sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok (Muslim, 2013). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Ilmu sosial menunjuk sosial pada objeknya yaitu masyarakat (Biantoro dan Ma'rif, 2014).

Demografi menurut KBBI merupakan ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk yang memberikan uraian atau gambaran statistik

mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik dan ilmu kependudukan.

Yasin dan Adiotomo (2010), mengatakan bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari perubahan kependudukan dan memberi gambaran tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok. Menurut Rusli (2012), demografi juga merupakan perubahan dinamika penduduk yang disebabkan karena fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan).

Pendidikan menjadi salah satu faktor dalam studi demografi.

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat dimana bertujuan untuk pengembangan dalam kemajuan hasil hutan yang dikelola sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Rahman dkk., 2015). Menurut peraturan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, kecerdasan, kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, dan keterampilan yang dimiliki dirinya untuk keperluan masyarakat, bangsa dan negara.

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka ia akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan disertai dengan pertimbangan atas langkah yang diambil. Hal ini sesuai dengan konsep dasar dari *human capital* bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah, maka akan meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan akan tetapi menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut (Nafisah, 2017).

Pendidikan merupakan usaha sadar bagi pengembangan manusia berlandaskan pada pemikiran tertentu yang didasarkan atas pandangan hidup atau filsafat hidup (Siswoyo, 2013). Menurut Suhardan dkk. (2012), pendidikan dapat memberikan keuntungan ganda, yaitu meningkatkan nilai harga diri dan kemampuan produktivitas yang besar. Pendidikan dapat memproses manusia hingga menjadi manusia produktif yang memiliki kemampuan membangun. Fungsi pendidikan yaitu untuk menyiapkan manusia sebagai tenaga kerja. Penyiapan manusia ini dilakukan melalui pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah (Siswoyo, 2013). Kecerdasan dan keterampilan hasil pendidikan akan menjadi karya nyata yang memajukan perekonomian (Suhardan dkk., 2012).

Siswoyo (2013) juga mengatakan setidaknya ada dua bagian besar fungsi pendidikan terhadap masyarakat, yaitu fungsi preserveratif dan fungsi direktif. Fungsi preserveratif dilakukan dengan melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, sedangkan fungsi direktif dilakukan oleh pendidikan sebagai agen pembaharuan sosial, sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Lebih lanjut bahwa pendidikan berfungsi untuk menyiapkan manusia sebagai tenaga kerja.

Selain pendidikan, umur juga menjadi salah satu faktor dalam demografi. Umur merupakan salah satu faktor pendukung pendapatan yang diperoleh seseorang. Kekuatan fisik dan keterampilan seseorang akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia yang semakin dewasa. Hal itu juga akan mengurangi kekuatan fisiknya untuk bekerja dikarenakan usia yang sudah tidak produktif lagi, sehingga sehingga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang

diterima (Dewi, 2012). World Health Organization (WHO) membedakan umur menjadi tiga kelompok, yaitu.

- 1) Penduduk usia muda, yaitu penduduk usia di bawah 15 tahun atau kelompok usia 0-14 tahun.
- 2) Penduduk usia produktif, yaitu penduduk usia 15-59 tahun.
- 3) Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk usia 60 tahun ke atas.

Nafisah (2017), mengatakan adanya perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh dalam perolehan pendapatan seseorang. Secara universal, produktivitas laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini terjadi dikarenakan fisik yang dimiliki perempuan kurang kuat dibandingkan fisik laki-laki. Di Indonesia, kaum perempuan cenderung mendapatkan upah yang lebih buruk dibandingkan laki-laki di pasar kerja. Menurut Tangkudung (2014), jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin menunjukkan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Umumnya laki-laki dan perempuan sangat berbeda dalam hal berperilaku dan kepribadiannya. Perbedaan individual keduanya juga dapat dilihat dalam hubungannya dengan peran jenis kelamin (Sugihartono dkk., 2013).

Dorongan dari luar diri individu petani juga memiliki peranan yang penting dalam peningkatan pendapatan. Kinerja penyuluh kehutanan menjadi sebuah upaya pembangunan kehutanan yang diberikan Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan. Penyuluhan kehutanan merupakan salah satu cara yang dinilai paling efektif untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal (Firmansyah dkk., 2015).

2.9 Kinerja Kelompok

Kelompok tani merupakan kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk secara langsung mengorganisir para petani dalam berusahatani. Secara teknis, penyuluh pertanian melakukan upaya penguatan kelembagaan kepada kelompok tani di lapangan. Penguatan kelembagaan tersebut perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain;

- (a) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok;
- (b) menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi serta efektivitas usahatani;
- (c) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota (Hermanto dan Swastika, 2011).

Upaya pembangunan pertanian erat kaitannya dengan upaya pengembangan sumberdaya manusia khususnya para petani, karena para petani yang mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan dalam usahatannya (Firdausi dkk., 2014). Rendahnya peran kelompok tani dalam berbagai program pengembangan usahatani yang dilakukan pemerintah di Indonesia disebabkan masih rendahnya tingkat kapasitas kelembagaan kelompok tani (Syahyuti, 2011). Kapasitas kelembagaan kelompok tani merupakan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsi dan peran yang dimilikinya untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan oleh seluruh anggota kelompok tani (Anantanyu, 2009).

Peningkatan kapasitas kelompok tani memerlukan adanya peran dari seolah penyuluh pertanian. Peran penyuluh merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam mendidik, membimbing, memfasilitasi dan mendampingi petani dalam pengelolaan usaha tani (Yunita, 2011).

Selain itu, adanya campur tangan dari pihak luar juga mendukung peningkatan kemampuan petani. Peran pihak luar merupakan segala bentuk bantuan, baik materiil maupun non materiil, yang berasal dari luar petani yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi petani dalam berusaha tani (Suprayitno, 2011). Ketua kelompok menjadi kunci dalam menjalankan kegiatan bersama anggotanya. Peran ketua kelompok tani ini merupakan semua bentuk kegiatan ketua kelompok tani sebagai koordinator, inspirator, dan motivator untuk semua anggota kelompok tani yang dipimpinnya (Hermanto dan Swastika, 2011). Partisipasi anggota merupakan keikutsertaan anggota dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan hasil, pemanfaatan, sampai dengan proses monitoring evaluasi kegiatan (Anantanyu, 2009).

Peningkatan kemampuan petani ini dapat dilakukan lebih efektif melalui pendekatan kelompok, antara lain kelompok tani. Peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, penguatan kelompok tani menjadi kuat dan mandiri, dan peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis diarahkan untuk pengembangan kelompok tani tersebut. Kelompok tani yang berkembang dan bergabung dengan kelompok tani

lain dalam satu wilayah tertentu untuk mengembangkan fungsinya sehingga mempunyai kemandirian yang kuat, lebih mudah menjalin kemitraan dan dapat mengembangkan fungsi kelompok tani (Redono, 2012).

Kelompok tani memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan program-program yang diberikan oleh pemerintah. Meningkatnya kinerja petani dalam menjalankan aktivitas usahatani tidak terlepas dari kemampuan, kesempatan, dan motivasi yang dimilikinya. Ketiga hal tersebut harus ada dan berjalan secara seimbang, karena jika salah satunya tidak terpenuhi mustahil, akan mencapai kinerja (*performance*) yang tinggi. Selain itu, peningkatan kinerja petani ditunjang oleh karakteristik individu yang kuat dan didukung oleh penyuluh (Sumarlan dkk., 2012).

Potensi sektor kehutanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional adalah melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan kelembagaan pendukungnya (Departemen Kehutanan, 2009). Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dibagi menjadi dua tipologi, yaitu secara tidak langsung menjadikan hutan sebagai penyangga kehidupan, termasuk sistem pertanian pangan dan secara langsung menjadikan hutan sebagai penyedia pangan. Sementara itu, pemanfaatan potensi kelembagaan meliputi kelembagaan pada tingkat manajemen pengelolaan kawasan hutan oleh sektor kehutanan, kelembagaan tingkat masyarakat, penguatan koordinasi dengan *stakeholder*, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan terkait ketahanan pangan nasional (Mayrowani dan Ashari, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdausi dkk. (2014) menunjukkan bahwa tingkat kinerja kelompok tani di daerah Rasanae Timur Kota Bima cenderung cukup baik. Indikator kinerja kelompok tani yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu: a) kemampuan merencanakan; b) kemampuan mengorganisasikan; c) kemampuan melaksanakan; d) kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan; dan e) kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. Keberdayaan dan kapasitas kelompok tani hutan yang baik akan memberikan dampak positif bagi sistem pengusahaan hutan (Supriono dkk., 2013). Kapasitas kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu faktor penting dalam program pengembangan usahatani agroforestri di Desa Cukangkawung. Tingkat kapasitas kelembagaan kelompok tani dipengaruhi secara langsung oleh tingkat kedinamisan kelompok tani dan tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani. Secara tidak langsung, hal ini juga dipengaruhi oleh kapasitas anggota, peran ketua, peran penyuluh, dukungan pihak luar, dan karakteristik individu anggota. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani adalah dengan meningkatkan kedinamisan kelompok tani dan partisipasi anggota dalam setiap kegiatan kelompok tani (Ruhimat, 2017).

2.10 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah kondisi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai secara berkelanjutan dan aktif.

Pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai mendidik, yaitu membuat

anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan masyarakat (Zubaedi, 2014).

Pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat memiliki ruang terbuka untuk mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri (Purnomo, 2013). Menurut Noor (2011) dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari tiga aspek yaitu: (a). *Enabling*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang; (b). *empowering*, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya; (c). *Protecting*, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Salah satu bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar hutan yang efektif adalah melalui bentuk pemberdayaan kelompok (Utama dkk., 2010). Terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan untuk penyelenggaraan pembangunan

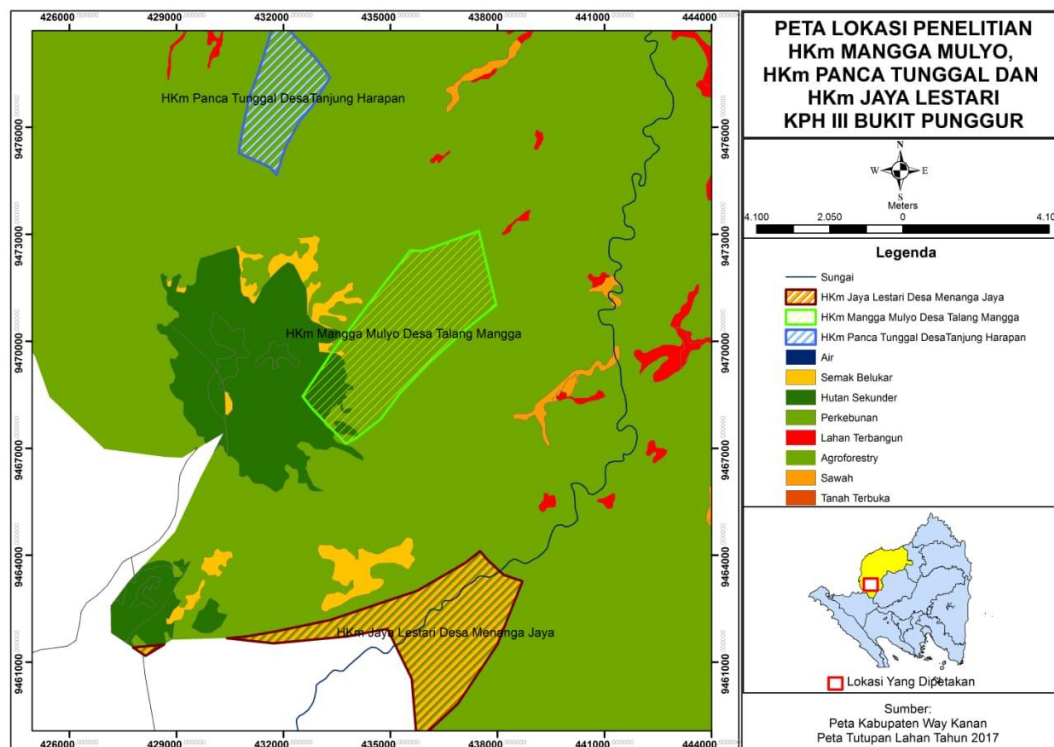
kehutanan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan di dalam dan sekitar hutan. Masalah tersebut yaitu dari isu kebijakan, isu kelembagaan, isu sumberdaya hutan, isu sumberdaya manusia dan isu sosial ekonomi (Reski dkk., 2017).

Menurut Sidu dan Sugihen (2007), tingkat keberdayaan masyarakat memiliki korelasi positif dan cukup kuat dengan ketersediaan faktor modal fisik (*physical capital*), modal manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), kemampuan pelaku pemberdayaan dalam mengenal kondisi sosial masyarakat sasaran dan perencanaan partisipatif serta proses pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara efektif.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di HKm Mangga Mulyo, HKm Panca Tunggal dan HKm Jaya Lestari KPH III Bukit Punggur, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada bulan Oktober tahun 2018. Lokasi penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta lokasi penelitian.

Lokasi tersebut dipilih secara sengaja untuk mengetahui kinerja kelompok HKm dan faktor sosial demografi masyarakat penggarap lahan di kawasan hutan. Nantinya, lokasi ini dapat menjadi acuan untuk lokasi lain dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera untuk mengambil gambar, lembar kuisisioner untuk melakukan wawancara kepada petani HKm dan *Software Minitab* versi 16 untuk mengolah data. Objek penelitian yaitu masyarakat petani di HKm Mangga Mulyo, HKm Panca Tunggal, dan HKm Jaya Lestari untuk mendapatkan informasi mengenai penghasilan dari lahan yang dikelola, gambaran keadaan umum, faktor-faktor sosial demografi petani dan keanekaragaman jenis vegetasi/ pohon yang berada di lahan petani.

3.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah responden, yaitu banyaknya responden yang diwawancarai sebanyak 75 orang yang diambil dari tiga HKm yang sudah ditentukan secara sengaja, yaitu HKm Mangga Mulyo, HKm Panca Tunggal, dan HKm Jaya Lestari.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder

Pengumpulan data secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden. Data sekunder diperoleh dari Kantor KPH III Bukit Punggur tentang peserta HKm sebagai acuan wawancara dengan para peserta HKm dan studi pustaka dari penelitian terdahulu yang terkait.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data berupa umur, jenis kelamin, jenis tanaman yang dibudidayakan, pendapatan rata-rata keluarga, status dalam HKm, status dalam masyarakat, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan, luas garapan di lahan HKm dan marga, etnis, seperti variabel penelitian yang telah dilakukan oleh Masri (2010), Nurdin dan Adioetomo (2010), Watung dkk. (2013). Lebih lanjut, data mengenai jarak dari tempat tinggal ke lahan HKm, pusat desa dan kecamatan, kepemilikan alat komunikasi dan informasi, kepemilikan ternak, kendaraan, kinerja penyuluhan, bantuan sosial dan kebun bibit, serta sosial-budaya responden diperoleh dari penelitian Pulungan dkk. (2015). Pendapatan diperoleh dari jumlah hasil panen setiap jenis tanaman yang dimiliki. Wawancara dilakukan kepada 75 responden yang dalam hal ini merupakan peserta HKm Mangga Mulyo, HKm Panca Tunggal, dan HKm Jaya Lestari.

3.4.3 Sampel Penelitian

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan secara sengaja. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, jumlah anggota ketiga HKm tersebut berjumlah 976 KK. Sampel penelitian diambil berdasarkan teorema Gauss Markov yang menyatakan hasil data bersifat normal jika data yang digunakan diatas 25 sampel (Juanda, 2009). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 75 responden (masing-masing 25 responden/HKm) dengan pertimbangan responden adalah petani penggarap lahan HKm di tiga kelompok HKm.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda menggunakan *software Minitab* versi 16 dengan selang kepercayaan 90%, artinya kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 10% (Yudischa dkk., 2014). Analisis regresi linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel. Bentuk umum analisis ini yaitu menghubungkan variabel dependen (Y) dengan satu atau lebih variabel bebas. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pendapatan petani yang diperoleh dari mengelola lahan. Variabel independen (X) adalah semua faktor atau variabel penduga yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel penduga (*predictor*), simbolisasi dan pemberian skor dalam model

Kelompok variabel penduga	Variabel penduga	Simbolisasi dalam model	Skala pengukuran dan satuannya
[1]	[2]	[3]	[4]
Dependen	Pendapatan masyarakat pertahun	[Y]	Rp juta/tahun
Pengelolaan (0 = Jaya lestari)	HKm Mangga Mulyo	[D1_MGM]	= 1 jika mangga mulyo, = 0 jika lainnya
	HKm Panca Tunggal	[D1_PCT]	= 1 jika panca tunggal, = 0 jika lainnya
Demografi	Umur	[UMR]	Satuan tahun
	Jenis kelamin KK	[KLM]	= 1 jika laki-laki, = 0 jika wanita
	Status dalam HKm	[S_HKkm]	= 1 jika pengurus, = 0 jika lainnya
	Status dalam masyarakat	[S_MSYPK]	= 1 jika pamong desa, = 0 jika lainnya
	Jumlah tanggungan	[JTG]	Jumlah jiwa
	Pendidikan KK	[D2_SMP]	= 1 jika SMP, = 0 jika lainnya
	(0 = tingkat SD)	[D2_SLTA]	= 1 jika SLTA, = 0 jika lainnya
	Etnis budaya	[D3_SMD]	= 1 jika semendo, = 0 jika lainnya
	(0 = etnis jawa)	[D3_OGAN]	= 1 jika ogan, = 0 jika lainnya
	Jarak dari rumah ke lahan HKm	[J_HKkm]	Satuan Km
Sosial	Jarak dari rumah ke pusat desa	[J_KEL]	Satuan Km
	Jarak dari rumah ke kecamatan	[J_KEC]	Satuan Km
	Kinerja penyuluhan	[PYLH]	= 1 jika ada, = 0 jika tidak ada
	Bantuan sosial	[SOS]	= 1 jika ada, = 0 jika tidak ada
	Bantuan bibit	[BIBIT]	= 1 jika ada, = 0 jika tidak ada
	Network	[BYK]	= 1 jika banyak, = 0 jika sedikit
	Norma (kepedulian)	[PDLI]	= 1 jika baik, = 0 jika tidak baik
	Trust	[PRCY]	= 1 jika baik, = 0 jika tidak baik
	Jumlah jenis tanaman	[J_TNMN]	Jumlah angka
	Luas garapan HKm	[LG_HKkm]	Ha
Aset ekonomi	Luas garapan marga	[LG_MRG]	Ha
	Ternak ayam	[T_AYAM]	Jumlah angka
	Ternak kambing	[T_KMBG]	Jumlah angka
	Ternak sapi	[T_SAPI]	Jumlah angka
	Kepemilikan kendaraan	[KNDR]	Jumlah angka
	Kepemilikan alat	[HP]	Jumlah angka
	komunikasi dan informasi	[TV]	= 1 jika ada, = 0 jika tidak ada

Sumber: Masri, (2010); Nurdin dan Adioetomo (2010); Watung dkk. (2013); Pulungan dkk. (2015).

Model penelitian yang digunakan merupakan metode regresi linier berganda yang meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat yaitu pengembangan model *Ordinary Least Square* (OLS) untuk memperoleh model (Y) sebagai fungsi dari kinerja

kelompok HKm dan variabel sosial demografi. Pola hubungan antar variabel yang akan dianalisis dilakukan berdasarkan atas data sampel yang diperoleh melalui kuisioner (Yudischa dkk., 2014). Model regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor sosial demografi diatas terhadap besarnya pendapatan petani adalah persamaan berikut.

$$[Y]_i = \alpha_0 + \alpha_1[D1_MGM]_i + \alpha_2[D1_PCT]_i + \alpha_3[UMR]_i + \alpha_4[KLM]_i + \alpha_5[S_HKm]_i + \alpha_6[S_MSYK]_i + \alpha_7[JTG]_i + \alpha_8[D2_SMP]_i + \alpha_9[D2_SLTA]_i + \alpha_{10}[D3_SMD]_i + \alpha_{11}[D3_OGAN]_i + \alpha_{12}[J_HKm]_i + \alpha_{13}[J_KEL]_i + \alpha_{14}[J_KEC]_i + \alpha_{15}[PYLH]_i + \alpha_{16}[SOS]_i + \alpha_{17}[BIBIT]_i + \alpha_{18}[BYK]_i + \alpha_{19}[PDLI]_i + \alpha_{20}[PRCY]_i + \alpha_{21}[J_TNMN]_i + \alpha_{22}[LG_HKm]_i + \alpha_{23}[LG_MRG]_i + \alpha_{24}[T_AYAM]_i + \alpha_{25}[T_KMBG]_i + \alpha_{26}[T_SAPI]_i + \alpha_{27}[KNDR]_i + \alpha_{28}[HP]_i + \alpha_{29}[TV]_i + \epsilon_i.$$

Dimana:

Y_i : pendapatan setiap individu rumah tangga ke-i

α_0 : konstanta model

$\alpha_1 - \alpha_{29}$: nilai kontribusi masing-masing variabel X.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah.

- a. Pengelolaan kelompok HKm berpengaruh nyata terhadap tingkat pendapatan petani di HKm Mangga Mulyo ($P= 0,073$), HKm Panca Tunggal ($P= 0,031$), dan HKm Jaya Lestari sebagai acuan. Tingkat pendapatan kelompok HKm Mangga Mulyo dan HKm Panca Tunggal masih lebih rendah dari kelompok HKm Jaya Lestari yang pengelolaannya sudah baik. Artinya bahwa pengelolaan di HKm Mangga Mulyo dan HKm Panca Tunggal perlu ditingkatkan agar pendapatan kelompok dapat turut meningkat atau lebih baik yang dapat diwujudkan melalui penguatan lembaga kepengurusan dan sering diadakannya perkumpulan untuk penyuluhan.
- b. Secara simultan, faktor sosial demografi berpengaruh sangat nyata terhadap pendapatan masyarakat petani di HKm Mangga Mulyo, HKm Panca Tunggal, dan HKm Jaya Lestari dengan nilai $P= 0,000$. Peranan faktor tersebut berada pada kelompok aset ekonomi yaitu pada variabel jumlah jenis tanaman ($P=0,005$), luas lahan garapan petani baik di lahan HKm ($P=0,000$) maupun lahan marga ($P=0,020$), dan kepemilikan ternak sapi ($P=0,095$).

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini yaitu kinerja kelompok HKm dapat lebih ditingkatkan lagi pada setiap HKm dengan menjalankan lembaga yang baik dan melakukan penyuluhan secara efektif dengan program yang bertujuan meningkatkan kemampuan petani. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan untuk memperhatikan fasilitas sosial seperti peningkatan pendidikan agar masyarakat dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adalina, Y., Nurrochman, R. R., Darusman, D. dan Sundawati, L. 2015. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar taman nasional gunung halimun salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 12(2): 105-118.
- Afandi, W. N. 2010. *Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Padang Pariaman*. Tesis. Universitas Andalas. Padang. 86 hlm.
- Aji, G. B., Suryanto, J., Yulianti, R., Wirati, A., Abdurrahim, A.Y. dan Miranda, T.I. 2014. *Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar Hutan. Pengembangan Model PHBM dan HKm*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Kependudukan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. 48 hlm.
- Ali, J., Delis, A. dan Hodijah, S. 2015. Analisis produksi dan pendapatan petani karet di kabupaten bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 2(4): 201-208.
- Amini, R. 2013. Analisis partisipasi wanita nelayan dalam program usaha garam rakyat (Pugar) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Media Ilmiah*. 38-41.
- Anantanyu. 2009. *Partisipasi petani dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok petani*. Disertasi. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 98 hlm.
- Andini, N. K., Nilakusmawati, D. P. E. dan Susilawati, M. 2013. Faktor-faktor yang memengaruhi penduduk lanjut usia masih bekerja. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. 9(1): 44-49.
- Andrian, Supriadi, dan Marpaung, P. 2014. Pengaruh ketinggian tempat dan kemiringan lereng terhadap produksi karet (*hevea brasiliensis* muell. arg.) di kebun hapesong ptpn iii tapanuli selatan. *Jurnal Online Agroekoteknologi*. 2(3): 981-989.
- Arifin, B., Swallow, B. M., Suyanto, S. dan Coe, R. 2009. Analysis a conjoint analysis of farmer preferences for community forestry contracts in the sumber jaya watershed, Indonesia. *Jurnal Ecological Economics*. 68: 2040-2050.

- Aswiyati, I. 2016. Peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah tangga keluarga petani tradisional untuk penanggulangan kemiskinan di desa kuwil kecamatan kalawat. *Jurnal Holistik*. 10(17): 1-17.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Geografi dan Iklim*. Buku. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Way Kanan. 260 hlm.
- Bahri, S. 2006. *Bercocok Tanam Tanaman Perkebunan Tahunan*. Buku. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 318 hlm.
- Bakri, S. dan Setiawan, A. 2017. Welfare improvement model through forest recovery, empowering small enterprises and farmer's parity schemes: An ethical choice problem of regional planning in Lampung-Indonesia. *Paper Presented on International Seminar of Agricultural Engineering (ISAE)*. Bandar Lampung 10-12 August 2017. 14 hlm.
- Biantoro, R. dan Ma'rif, S. 2014. Pengaruh pariwisata terhadap karakteristik sosial ekonomi masyarakat pada kawasan objek wisata candi borobudur kabupaten magelang. *Jurnal Teknik PWK*. 3(4): 1038-1047.
- Budiartiningsih, R., Maulida, Y. dan Taryono. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan keluarga petani melalui sektor informal di desa kedaburapat, kecamatan rangsang barat, kabupaten bengkalis. *Jurnal Ekonomi*. 18(1): 79-93.
- Budiman, H. 2012. *Budidaya Karet Unggul*. Buku. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 135 hlm.
- Coe, R., Sinclair, F. L. dan Barrios, E. 2014. Scaling up agroforestry requires a research in rather than for development paradigm. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. 6: 73-77.
- Departemen Kehutanan. 1995. *Keputusan Menteri Kehutanan No.622/Kpts-II/1995 Tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan*. Departemen Kehutanan. Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan. Jakarta. 65 hlm.
- Departemen Kehutanan. 2009. Pangan dari hutan (kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan nasional). *Makalah Seminar Nasional "Memantapkan Ketahanan Pangan Nasional Mengantisipasi Krisis Global"*, dalam *Rangka Hari Pangan Sedunia*. Jakarta. 87 hlm.
- Dewi, I. N., Awang, S. A., Andayani, W. dan Suryanto, P. 2018. Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (hkm) terhadap pendapatan petani di kulon progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 12: 86-98.
- Dewi, P. M. 2012. Partisipasi tenaga kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 5(2): 118-125.

- Djamhuri, T.L. 2008. Community participation in a social forestry program in central java, indonesia: the effect of incentive structure and social capital. *Agroforestry Systems*. 74: 83-96.
- Dwiprabowo, H., Mulyaningrum, dan Suwarno, E. 2013. Organisasi belajar dan implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan (hkm). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 10(2): 85-98.
- Ekawati, S., Budiningsih, K., Sylviani, Suryandari, E. dan Hakim, I. 2015. Kajian tinjauan kritis pengelolaan hutan di pulau jawa. *Policy Brief*. 9(1): 1-12.
- Elvida, Y. S. dan Prahasto, H. 2008. Potensi pengembangan hutan kemasyarakatan di hutan produksi way terusan, lampung tengah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 8(1): 1-14.
- Fathoni. 2010. Strategi implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di indonesia. *Jurnal Komunikasi*. 20(5): 201-209.
- Firdausi, A., Koestiono, D. dan Muhaimin, A. W. 2014. Analisis tingkat kinerja kelompok tani serta hubungannya dengan tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani (studi kasus di kecamatan rasanae timur kota bima). *Agricultural Sosio-Economics Journal*. XIV(2): 118-126.
- Firmansyah, Amanah, S. dan Sadono, D. 2015. Motivasi, kepuasan kerja dan kinerja penyuluh kehutanan di kabupaten cianjur jawa barat. *Jurnal Penyuluhan*. 11(1): 11-22.
- Forest Watch Indonesia. 2015. *Potret Keadaan Hutan di Indonesia Periode 2009-2013*. Paper. Forest Watch Indonesia. Bogor. 1 hlm.
- Fukuyama, F. 2007. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Buku. Qalam. Jakarta. 120 hlm.
- Hakim, I. 2009. Kajian kelembagaan dan kebijakan hutan tanaman rakyat: sebuah terobosan dalam menata kembali konsep pengelolaan hutan lestari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 6(1): 27-24.
- Hakim, I. 2010. *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Buku. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor. 141 hlm.
- Hamid, R., Zulkarnaini, dan Saam, Z. 2011. Analisis sosial ekonomi masyarakat desa hutan pasca kegiatan hph pt siak raya timber di kabupaten pelalawan, provinsi riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 5(2): 130-148.

- Haryanto, S. 2008. Peran aktif wanita dalam peningkatan pendapatan rumah tangga miskin: studi kasus pada wanita pemecah batu di pucanganak kecamatan tugu trenggalek. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 9(2): 216-227.
- Hermanto, dan Swastika, D. K. S. 2011. Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 9(4): 371-390.
- Hilmanto, R. 2010. Analisis penelusuran dan perekaman teknik pengelolaan lahan untuk standarisasi kegiatan produksi komoditas agroforestri lokal. *Jurnal Standarisasi*. 12(2): 69-78.
- Indrawati, T. dan Yovita, I. 2014. Analisis sumber modal pedagang tradisional di kota pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*. 22(1): 21-35.
- Juanda, B. 2009. *Ekonometrika: Pemodelan dan Pendugaan*. Buku. IPB Press. Bogor. 240 hlm.
- Kabupaten Way Kanan dalam Angka. 2018. *Geografi dan Iklim*. Buku. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Way Kanan. 260 hlm.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A. dan Inoue, M. 2017. Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: a case study of lampung province, indonesia. *Jurnal of Sustainable Forestry*. 36: 250-263.
- Kementerian Kehutanan. 2012. *Peran Sektor Kehutanan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional*. Makalah. Kuliah Umum di Universitas Lampung. Bandar lampung. 69 hlm.
- Keputusan Menteri Kehutanan. 1995. *Kepmenhut Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan*. Menteri Kehutanan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. 1998. *Kepmenhut dan perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan*. Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehutanan. 2001. *Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan*. Jakarta.
- Keraf, S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Buku. Kompas Media Nusantara. Jakarta. 157 hlm.
- Kusumastuti, N.A. 2012. Pengaruh faktor pendapatan, umur, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan suami dan jarak tempuh ke tempat kerja terhadap curahan jam kerja pedagang sayur wanita (studi kasus di Pasar Umum Purwodadi). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 54-72.

- Liana, Y. 2016. Peran ibu dalam meningkatkan pendapatan keluarga untuk menanggulangi kemiskinan. *Jurnal Dinamika Dot Com*. 7(2): 44-51.
- Lendensang, Y. 2014. Analisis modal sosial pada komunitas anak jalanan di pasar pagi kota samarinda, kalimantan timur. *E Journal Ilmu Sosiatri*. 2(2): 41-54.
- Lumintang, F. M. 2013. Analisis pendapatan petani padi di desa teep kecamatan langowan timur. *Jurnal Riset Ekonomi, Pengelolaan, Bisnis dan Akuntansi*. 1(3): 991-998.
- Mahareni, S. 2011. *Pengaruh Kemampuan Manajerial Pengurus dan Kinerja Karyawan terhadap Kualitas Pelayanan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Fajar baru Kecamatan Sukoharja Kabupaten Kendal 2011*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 79 hlm.
- Mailusiana, S. F. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Lahan Sawah Tadah Hujan di Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 63 hlm.
- Manyamsari, I. dan Mujiburrahmad. 2014. Karakteristik petani dan hubungannya dengan kompetensi petani lahan sempit. *Jurnal Agrisep*. 15(2): 58-74.
- Marwa, J., Purnomo, H. dan Nurrochmat, D. R. 2010. *Managing The Last Frontier of Indonesian Forest in Papua*. Buku. Bogor Agricultural University. Bogor. 151 hlm.
- Marwoto, 2012. *Peran Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Rakyat dan Perdagangan Kayu Rakyat (Kasus di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah)*. Tesis. IPB. Bogor. 127 hlm.
- Masri. 2010. *Identifikasi Karakteristik Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Nelayan Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman dalam Penyediaan Perumahan Pemukiman*. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Dipenogoro. Semarang. 141 hlm.
- Mayes, L. dan Lewis, M. 2012. *Hand Book of Environment in Human Development*. Buku. Cambridge University Press. 183 hlm.
- Mayrowani, H. dan Ashari. 2011. Pengembangan agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani sekitar hutan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 29(2): 83-98.
- Menteri Kehutanan. 2011. *SK Menhut Nomor 447/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Areal Kerja HKm*. Jakarta.
- Menteri Kehutanan. 2013. *SK Menhut Nomor 883/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja HKm*. Jakarta.

- Mbow, C., Smith, P., Skole, D., Duguma, L. dan Bustamante, M. 2014. Achieving mitigation and adaptation to climate change through sustainable agroforestry practices in Africa. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. 6: 8-14.
- Moktan, M. R., Norbu, L. dan Choden, K. 2015. Can community forestry contribute to household income and sustainable forestry practices in rural area a case study from tshapey and zariphensum in bhutan. *Journal of Forest Policy and Economics*. 4(1): 11-19.
- Mulyadin, R. M., Surati, dan Ariawan, K. 2016. Kajian hutan kemasyarakatan sebagai sumber pendapatan: kasus di kabupaten gunungkidul, yogyakarta. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 13(1): 13-23.
- Muslim, A. 2013. Interaksi sosial dalam masyarakat multietnis. *Jurnal Diskursus Islam*. 1(3): 484-494.
- Nafisah, J. 2017. *Pengaruh Faktor Demografi terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Sektor Primer di Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 94 hlm.
- Nazir. 2010. *Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan. 92 hlm.
- Noor, M. 2011. Pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. 1(2): 87-99.
- Nurdin, H. dan Adioetomo, S. M. 2010. *Komposisi dan Distribusi Penduduk*. Buku. Salemba Empat. Jakarta. 445 hlm.
- Nurhaida, I., Setiawan, A., Bakri, S., Wiranata, G. A. B. dan Syah, P. 2011. Pengembangan komik fabel untuk media komunikasi dan suplemen pendidikan lingkungan dalam rangka kampanye keanekaragaman hayati di kawasan penyangga taman nasional way kambas lampung. *Bumi Lestari: Jurnal Lingkungan Hidup*. 11(2): 331-345.
- Nurrochmat, D. R., Darusman, D. dan Ruchjadi, D. 2014. Rekonstruksi sistem tenurial kehutanan. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 1(1): 24-29.
- Olivi, R. 2014. *Kontribusi Agroforestri Terhadap Pendapatan Petani di Desa Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*. Skripsi. Universitas Lampung. Lampung. 27 hlm.
- Olivi, R., Qurniati, R. dan Firdasari. 2015. Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani di desa sukoharjo 1 kecamatan sukoharjo, kabupaten pringsewu. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2): 1-12.

- Pangadaheng, Y. 2012. *Analisis Pendapatan Petani Kelapa di Kecamatan Saliabu Kabupaten Talaud*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 88 hlm.
- Patty, Z. 2010. Kontribusi komoditi kopra terhadap pendapatan rumah tangga tani di kabupaten halmahera utara. *Jurnal Agroforestri*. 3(3): 51-57.
- Peraturan Menteri Kehutanan. 2007. *Permenhut Nomor P.37/ Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan*. Menteri Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *PermenLHK No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial*. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. 2007. *PP No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan*. Jakarta. 88 hlm.
- Pertiwi, P. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 68 hlm.
- Pulungan, W. A., Bakri, S. dan Hilmanto, R. 2015. Telaah faktor sosial demografi terhadap kesetujuan masyarakat pada rencana pengembangan htr di kph gedong wani. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(3): 41-50.
- Purnomo, D. 2013. Modal sosial dan pemberdayaan masyarakat nelayan. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2(1). 1-12.
- Purnomo, E. P. 2011. *Pengembangan Hutan berbais Rakyat Berkelanjutan*. Buku. New Elematera Publisher. Yogyakarta. 116 hlm.
- Purwanti, R. 2007. Pendapatan petani dataran tinggi sub das malino (studi kasus: kelurahan gantarang, kabupaten gowa). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 4(3): 257-269.
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A. dan Banuwa, I. S. 2017. Aspek sosial ekonomi pada sistem agroforestri di areal kerja hutan kemasyarakatan (hkm) kabupaten lampung barat, provinsi lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 95-103.
- Puspitasari, N., Puspitawati, H. dan Herawati, T. 2013. Peran gender, kontribusi ekonomi perempuan, dan kesejahteraan keluarga petani hortikultura. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 6(1): 10-19.
- Putri, A. D. dan Setiawina, N. D. 2013. Pengaruh umur, pendidikan, pekerjaan terhadap pendapatan rumah tangga miskin di desa bebandem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 2(4): 1-9.

- Rahman, E., Roslinda, E. dan Kartikawati, S. M. 2015. Norma sosial masyarakat desa nusapati dalam pengelolaan hutan rakyat. *Jurnal Hutan Lestari*. 4(2): 244–249.
- Ramdani, R. 2016. Pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan hutan: studi kasus kelompok tani hutan (kth) kemasyarakatan sedyo makmur kecamatan semanu, kabupaten gunungkidul, daerah istimewa yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 1(2): 118-131.
- Rani, A. P. dan Santi, A. W. N. 2011. Sistem distribusi hasil pertanian karet di desa mandiingin barat. *Jurnal Spread*. 1(1): 1-8.
- Redono, C. 2012. Peran gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam mewujudkan kelompok tani yang kuat dan mandiri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. 4(2): 1-10.
- Reski, N. A., Yusran, Y. dan Makkarennu. 2017. Rancangan pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) desa pacekke, kecamatan soppeng riaja, kabupaten barru, sulawesi selatan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9(1): 37-43.
- Rinawati, R. 2012. *Social Capital of the Community in the Development Private Forest at the Sub Watershed of Upstream Cisadane*. Tesis. IPB. Bogor. 126 hlm.
- Ruhimat, I. S. 2017. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usahatani *agroforestry*: studi kasus di desa cukangkawung, kecamatan sodonghilir, kabupaten tasikmalaya, provinsi jawa barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 14(1): 1-17.
- Rusli, S. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Buku. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta. 134 hlm.
- Ruswandi, A., Rustiadi, E. dan Mudikjo, K. 2007. Dampak konversi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani dan perkembangan wilayah studi kasus di daerah bandung utara. *Jurnal Agro Ekonomi*. 25(2): 207-219.
- Sanjaya, R. 2016. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 63 hlm.
- Santoso, H. 2011. Hutan kemasyarakatan dan hutan desa tafsir setengah hati pengelolaan hutan berbasis masyarakat versi kementerian kehutanan ri. *Jurnal Kehutanan Masyarakat*. 3(1): 53-60.

- Sanudin, Awang, S. A., Sadono, R. dan Purwanto, R. H. 2016. Perkembangan hutan kemasyarakatan di provinsi lampung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 23(2): 276-283.
- Sanudin, dan Priambodo, D. 2013. Analisis sistem dalam pengelolaan hutan rakyat agroforestry di hulu das citanduy: kasus di desa sukamaju, ciamis. *Jurnal Online Pertanian Tropik*. 1(1): 33-46.
- Sidu, D. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana. IPB. Bogor. 131 hlm.
- Sidu, D. dan Sugihen, B. G. 2007. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung jompi kabupaten muna provinsi sulawesi tenggara. *Jurnal Penyuluhan*. 3(1): 11-17.
- Silalahi, U. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Buku. Refika Aditama. Bandung. 666 hlm.
- Siswoyo, D. 2013. *Ilmu Pendidikan*. Buku. UNY Press. Yogyakarta. 43 hlm.
- Sugihartono, Fathiyah, K. T., Harahap, F., Agus, F. S. dan Rohmah, S. N.. 2013. *Psikologi Pendidikan*. UNY Press. Yogyakarta. 192 hlm.
- Suhardan, D., Riduwan, dan Enas. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan*. Buku. Alfabeta. Bandung. 278 hlm.
- Sukmawati, W., Arkeman, Y. dan Maarif, S. 2014. Inovasi sistem agroforestri dalam meningkatkan produktivitas karet alam. *Jurnal Teknik Industri*. 4(1): 58-64.
- Sumarlan, Sumardjo, Tjitropranoto, P. dan Gani, D. S. 2012. Peningkatan kinerja petani sekitar hutan dalam penerapan sistem agroforestri di pegunungan kendeng pati. *Jurnal Agro Ekonomi*. 30(1): 25-39.
- Sumastuti, E. 2009. Analisis pendapatan keluarga petani tebu di kabupaten pekalongan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. 5(1): 10-25.
- Suprapti, E. 2018. Pengaruh modal, umu, jam kerja dan pendidikan terhadap pendapatan pedagang perempuan pasar barongan bantul. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. 7(2): 175-183.
- Suprayitno, A. 2011. *Model Peningkatan Partisipasi Petani Sekitar Hutan dalam Mengelola Hutan Kemiri Rakyat: Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. Disertasi. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 117 hlm.

- Supriono, A., Bowo, C., Kosasih, A. S. dan Herawati, T. 2013. Strategi penguatan kapasitas kelompok tani hutan rakyat di kabupaten situbondo. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 10(3): 139-146.
- Surastyawan, Y. 2017. *Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Way Kanan (Studi pada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Register 24 Bukit Punggur)*. Skripsi. Universitas Lampung. Lampung. 90 hlm.
- Suratiyah, K. 2001. Pekerjaan luar usahatani (kasus rumah tangga petani gurem di jawa). *Jurnal Agro Ekonomi*. 8(2): 65-72.
- Suyanto, S. dan Khususiyah, N. 2006. Imbalan jasa lingkungan untuk pengentasan kemiskinan. *Jurnal Agro Ekonomi*. 24(1): 95-113.
- Syahyuti. 2011. *Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani*. Buku. IPB Press. Bogor. 192 hlm.
- Syofiandi, R. R., Hilmanto, R. dan Herwanti, S. 2016. Analisis pendapatan dan kesejahteraan petani agroforestri di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling kota bandar lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2): 17-26.
- Tangkudung, J. P. M. 2014. Proses adaptasi menurut jenis kelamin dalam menunjang studi mahasiswa fisip universitas sam ratulangi. *Jurnal Acta Diurna*. 3(4): 1-11.
- Ulfah, D., Thamrin, G. A. R. dan Natanael, T. W. 2015. Pengaruh waktu penyadapan dan umur tanaman karet terhadap produksi getah (lateks). *Jurnal Hutan Tropis*. 3(3): 247-252.
- Undang-Undang. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Utama, S., Sumardjo, Susanto, D. dan Gani, D. S. 2010. Dinamika kelompok tani hutan pada pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat di perum perhutani unit i provinsi jawa tengah. *Jurnal Penyuluhan*. 6(1): 49-64.

- Watung, N., Dien, C. dan Kotambunan, O. 2013. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan di desa lopana kecamatan amurang timur provinsi sulawesi utara. *Jurnal Akulturasi*. 1(2): 9-12.
- Widyasworo, R. 2014. Analisis pengaruh pendidikan, kesehatan, dan angkatan kerja wanita terhadap kemiskinan di kabupaten gresik (studi kasus 2008-2012). *Jurnal Agrika*. 161-170.
- Wijayanto, N. dan Hartoyo, A. P. P. 2015. Biodiversitas berbasis agroforestry. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*. 1(2): 242-246.
- Winarni, S., Wiyono, S. B. dan Hernawanti, S. 2016. Struktur pendapatan tingkat kesejahteraan dan faktor produksi agroforestry kopi pada kesatuan pemangkuan hutan lindung (kphl) batu tegi. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1): 1-10.
- Winata, A. dan Yuliana, E. 2012. Tingkat partisipasi petani hutan dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat (phbm) perhutani. *Mimbar*. XXVIII(1): 65-76.
- Wulandari, C. 2009. *Buku Ajar Kebijakan dan Peraturan Perundangan Kehutanan*. Buku. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 94 hlm.
- Wulandari, C., Budiono, P. dan Nurrochmat, D. R. 2016. Kesiapan daerah dalam implementasikan program perhutanan sosial pasca terbitnya UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 3(2): 108-116.
- Wulandari, C., Budiono, P., Yuwono, S. B. dan Herwanti, S. 2014. Adoption of agro-forestry patterns and crop systems around register 19 forest park, lampung province, indonesia. *Jurnal Pengelolaan Hutan Tropika*. 20(2): 86-93.
- Wulandari, C. dan Budiono, P. 2015. Social capital status on community forestry (hutan kemasyarakatan) development in lampung. *International Conference of Indonesia Forestry Researchers III – 2015*. 1-8.
- Yasin, M. dan Adioetomo, S. M. 2010. *Demografi: Arti dan Tujuan*. Buku. Salemba Empat. Jakarta. 417 hlm.
- Yudischa, R., Wulandari, C. dan Hilmanto, R. 2014. Dampak partisipasi wanita dan faktor demografi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) terhadap pendapatan keluarga di kabupaten lampung barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(3): 59-72.
- Yunita. 2011. *Strategi Peningkatan Kapasitas Petani Padi Sawah Lebak Menuju Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan*

Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 148 hlm.

Yusuf, M. A. dan Makarawo, T. M. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Buku. Rineka Cipta. Jakarta. 19 hlm.

Zega, S.B. 2013. Analisis pengelolaan agroforestry dan kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat. *Jurnal Peronema Forestry Science*. 2(2): 152-162.

Zubaedi. 2014. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Buku. Kencana. Jakarta. 119 hlm.